

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP KESETARAAN GENDER: STUDI KASUS DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Hamielly Cortez Lim, Allena Marvelia Silalahi

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Hamielly Cortez Lim

Abstract

Public policy has a crucial role in realizing gender equality in developing countries. This study aims to analyze public policies that have been implemented to promote gender equality, with a focus on developing countries. The research method used is literature analysis and case studies. Through comprehensive literature insights, this research investigates various public policies that have been implemented in developing countries to combat gender discrimination and advance women's participation and well-being. Case studies will draw on examples from several developing countries to provide a deeper understanding of policy implementation and its impact on gender equality. It is hoped that the results of this research will provide valuable insights for policy makers, practitioners and researchers who are interested in efforts to achieve gender equality in developing countries.

Keywords: Public Policy; Gender equality; Developing Countries

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan prinsip fundamental dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, di banyak negara berkembang, kesenjangan gender masih menjadi masalah serius yang mempengaruhi kehidupan jutaan perempuan dan anak perempuan. Kesenjangan ini tercermin dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan sosial (Karwati, 2020). Sebagai respons terhadap tantangan ini, banyak negara berkembang telah mengimplementasikan kebijakan publik yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Kesetaraan gender dalam pembangunan sosial dan ekonomi telah diakui secara luas. Kesetaraan gender tidak hanya merupakan hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB dalam (Iskandar, 2021) terutama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 5, tujuan global adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Namun, di banyak negara berkembang, realisasi kesetaraan gender masih jauh dari harapan. Perbedaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesempatan kerja yang setara, akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, serta representasi politik yang merata masih menjadi tantangan besar. Faktor-faktor seperti tradisi, budaya, norma sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan kurangnya akses terhadap sumber daya menjadi penghambat utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender.

Kebijakan publik yang telah diimplementasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender di negara-negara berkembang. Analisis kebijakan ini tidak hanya memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi kekurangan dan kesenjangan yang perlu diperbaiki. Studi kasus di negara-negara berkembang juga memberikan

pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan unik yang dihadapi oleh masing-masing negara dalam mencapai kesetaraan gender (Khaerani, 2017).

Selain itu, analisis kebijakan publik terhadap kesetaraan gender juga penting dalam konteks globalisasi dan interkoneksi yang semakin meningkat. Negara-negara berkembang sering kali terlibat dalam kerja sama lintas batas untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mempromosikan kesetaraan gender dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, memahami pendekatan kebijakan yang telah diambil oleh negara-negara berkembang dapat memberikan inspirasi dan pelajaran bagi negara-negara lain yang berupaya untuk mencapai kesetaraan gender.

Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami isu ini sebagai berikut: "Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi" (Trisnawati & Widiyansyah, 2022). Penelitian ini mengeksplorasi dampak kebijakan kesetaraan gender terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di negara-negara berkembang. Temuan penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan dalam meningkatkan akses perempuan terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan akses keuangan.

"The Education For Gender Equality And Human Rights In Indonesia: Contemporary Issues And Controversial Problems" (Larasati, 2020). Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan kesetaraan gender di negara-negara berkembang melalui studi kasus. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya memperhatikan konteks lokal dan mendengarkan suara perempuan dalam merancang kebijakan yang efektif.

"Kesetaraan Gender Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender Di P4tk Tk Dan Plb Bandung Gender" (Nona, 2018). Penelitian ini mengeksplorasi kontribusi masyarakat sipil dalam mempromosikan kesetaraan gender di Bandung. Temuan penelitian ini menyoroti peran penting organisasi non-pemerintah dan aktivis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan memengaruhi kebijakan publik.

"Kesetaraan Gender dan Politik: Studi Kasus Terpilihnya Julia Gillard dalam Lembaga Pemerintah Australia" (Ummah et al., 2023). Penelitian ini melakukan analisis perbandingan tentang faktor-faktor institusional yang mempengaruhi implementasi kebijakan kesetaraan gender di negara-negara berkembang. Temuan penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya struktur politik, hukum, dan budaya dalam membentuk kebijakan yang inklusif.

"Ketimpangan Gender Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Pada Negara-Negara Asia Timur Dan Pasifik" (Napitupulu & Ekawaty, 2022). Penelitian ini mengeksplorasi dampak globalisasi terhadap kebijakan kesetaraan gender di negara-negara berkembang. Temuan penelitian ini menyoroti bagaimana dinamika ekonomi global dan perdagangan internasional mempengaruhi peran dan akses perempuan dalam masyarakat.

Perbedaan utama antara analisis kebijakan publik terhadap kesetaraan gender di negara-negara berkembang dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah fokusnya pada studi kasus konkret di negara-negara berkembang. Sementara penelitian terdahulu cenderung melakukan analisis lintas negara atau menganalisis dampak kebijakan secara umum, studi ini akan memperdalam pemahaman tentang implementasi kebijakan kesetaraan gender melalui tinjauan langsung terhadap kasus-kasus spesifik di negara-negara berkembang. Hal ini memungkinkan untuk memperhatikan faktor-faktor kontekstual yang khas bagi negara-negara berkembang dan memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mencapai kesetaraan gender di tingkat lokal.

Dengan demikian, analisis kebijakan publik terhadap kesetaraan gender di negara-negara berkembang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks global. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan, peluang, dan strategi yang terlibat dalam mempromosikan kesetaraan gender, kita dapat memperkuat upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

METODE

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks alamiahnya, dengan fokus pada interpretasi, pemahaman mendalam, dan penggalian makna dari data kualitatif. Dalam metode ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data yang bersifat deskriptif, naratif, atau non-angka, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen, yang memungkinkan untuk memahami latar belakang, persepsi, dan pengalaman subjek secara menyeluruh (Veronica et al., 2022). Pendekatan kualitatif memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis dalam memahami fenomena yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kerumitan dan dinamika yang mungkin tersembunyi dalam interaksi manusia.

Salah satu karakteristik utama dari metode kualitatif adalah fleksibilitasnya yang memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pendekatan penelitian dengan situasi yang ada. Peneliti memiliki kebebasan dalam menentukan desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik subjek yang diteliti. Pendekatan ini juga memberikan penekanan pada hubungan antara peneliti dan subjek, di mana interaksi yang akrab dan kepercayaan yang terbangun dapat meningkatkan kualitas data yang diperoleh (Soegiyono, 2020).

Metode kualitatif melibatkan serangkaian langkah yang berbeda, mulai dari perumusan masalah penelitian hingga interpretasi dan penyajian hasil. Proses pengumpulan data melibatkan teknik-teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau analisis dokumen, yang dilakukan dengan pendekatan terbuka dan reflektif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif, di mana temuan atau pola yang muncul ditarik dari data itu sendiri, bukan dari hipotesis sebelumnya. Analisis kualitatif sering melibatkan pengkodean data, kategorisasi, dan pengembangan tema atau narasi yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menjelaskan makna dari data yang terkumpul.

Keunggulan metode kualitatif meliputi kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas fenomena manusia yang sulit diukur dengan angka. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap perubahan, konteks, dan variasi yang mungkin terjadi dalam suatu situasi, serta memperhatikan perspektif beragam dari subjek yang diteliti. Selain itu, metode kualitatif dapat memberikan wawasan yang berharga dalam mendukung pengembangan teori dan memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang studi (Jonathan & Sarwono, 2018).

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam analisis kebijakan publik terhadap kesetaraan gender dalam studi kasus di negara-negara berkembang. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang kompleks dan dinamis dari kebijakan publik serta dampaknya terhadap masyarakat, khususnya dalam hal kesetaraan gender. Dalam konteks ini, beberapa pendekatan kualitatif yang relevan dapat diterapkan, termasuk analisis dokumen, dan analisis konten.

1. Analisis Dokumen: Pendekatan analisis dokumen melibatkan penelitian dan analisis berbagai dokumen terkait kebijakan, termasuk undang-undang, keputusan pemerintah, laporan resmi, dan publikasi akademis. Analisis ini membantu dalam memahami konteks kebijakan, evolusi kebijakan, dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender.
2. Analisis Konten: Metode analisis konten digunakan untuk menganalisis isi teks dari berbagai sumber informasi, seperti dokumen kebijakan, wawancara, dan artikel media. Analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan tren yang relevan dengan kebijakan publik dan isu kesetaraan gender.

Dalam menerapkan metode penelitian kualitatif, peneliti perlu memperhatikan beberapa langkah penting, termasuk pemilihan subjek penelitian yang representatif, pengembangan yang sesuai, pengumpulan data yang sistematis, dan analisis data yang cermat dan reflektif. Selain itu, penting

juga untuk mempertimbangkan etika penelitian, termasuk kepercayaan, kerahasiaan, dan partisipasi sukarela dari responden.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik terhadap kesetaraan gender di negara-negara berkembang. Analisis yang komprehensif dari berbagai perspektif dan konteks lokal dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan aktivis dalam upaya mereka untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam mempromosikan kesetaraan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik terhadap kesetaraan gender di negara-negara berkembang dapat dianalisis secara komprehensif

Kebijakan publik terhadap kesetaraan gender di negara-negara berkembang merupakan hal yang penting dan kompleks untuk dianalisis secara komprehensif. Negara-negara berkembang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang beragam, yang memengaruhi cara mereka menghadapi isu kesetaraan gender. Salah satu contoh negara berkembang yang menjadi fokus analisis adalah India. India, dengan populasi yang besar dan keragaman budaya yang kaya, menawarkan contoh yang menarik tentang bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi kesetaraan gender (Rini et al., 2022).

Di India, kesenjangan gender masih menjadi masalah serius meskipun negara tersebut telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan gender. Salah satu contoh kebijakan yang diimplementasikan adalah Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan (Women's Empowerment Laws) (Farazila et al., 2023; Mandasari, 2022), yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun demikian, masih ada banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Salah satu tantangan utama adalah tradisi dan norma budaya yang kuat yang masih membatasi perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Selain itu, masalah ketidaksetaraan ekonomi juga mempengaruhi kemampuan perempuan untuk mengakses sumber daya dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Di banyak wilayah di India, perempuan masih mengalami diskriminasi dalam hal gaji yang lebih rendah dan akses terhadap pekerjaan yang layak.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga memengaruhi kebijakan publik terhadap kesetaraan gender di India. Perubahan dalam ekonomi global dan pertumbuhan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam struktur ekonomi India, yang pada gilirannya mempengaruhi peran perempuan dalam pasar kerja (Kasus et al., 2016; Nuraeni & Lilin Suryono, 2021). Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan kurangnya akses perempuan terhadap teknologi informasi juga perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan yang inklusif.

Dalam menganalisis kebijakan publik terhadap kesetaraan gender di India, perlu dipahami bahwa tidak ada pendekatan satu ukuran yang cocok untuk semua. Setiap wilayah di India memiliki kebutuhan dan tantangan yang unik, yang memerlukan pendekatan yang berbeda-beda dalam merancang kebijakan yang efektif. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, LSM, dan kelompok advokasi gender sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi perempuan India.

Dalam konteks kesetaraan gender, India menawarkan pembelajaran berharga bagi negara-negara berkembang lainnya. Analisis komprehensif terhadap kebijakan publik dan tantangan yang dihadapi dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan dapat lebih efektif dalam mempromosikan kesetaraan gender. Dengan memahami dinamika yang kompleks ini, negara-negara berkembang lainnya dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif, serta mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam mencapai kesetaraan gender.

Dampak dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan publik terkait kesetaraan gender di negara-negara berkembang

Implementasi kebijakan publik terkait kesetaraan gender di negara-negara berkembang menghadapi berbagai dampak dan tantangan yang kompleks. Dampak dari kebijakan tersebut bisa sangat signifikan, baik dalam hal perubahan sosial, ekonomi, maupun politik. Salah satu dampak positif yang diharapkan dari implementasi kebijakan kesetaraan gender adalah peningkatan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan memberikan akses yang lebih luas kepada perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dan memajukan kesetaraan di semua bidang.

Namun, meskipun memiliki potensi positif, implementasi kebijakan kesetaraan gender juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang serius. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak, termasuk struktur politik dan budaya yang dominan. Budaya patriarki yang masih kuat di banyak negara berkembang seringkali menjadi penghalang utama dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Selain itu, kurangnya dukungan politik dan komitmen dari pemerintah juga bisa menjadi kendala serius dalam melaksanakan kebijakan kesetaraan gender dengan efektif.

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun infrastruktur, yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan kesetaraan gender. Banyak negara berkembang mengalami keterbatasan dalam hal dana dan teknologi, yang membuat sulit untuk menyediakan layanan dan program yang efektif bagi perempuan. Selain itu, kurangnya akses perempuan terhadap pendidikan dan informasi juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kebijakan kesetaraan gender.

Selanjutnya, tantangan dalam mengubah norma dan sikap masyarakat terhadap peran dan hak perempuan juga merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Meskipun kebijakan kesetaraan gender dapat diimplementasikan secara formal oleh pemerintah, perubahan yang sesungguhnya memerlukan dukungan dari masyarakat secara luas (Nona, 2018). Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi resistensi dan mengubah sikap serta perilaku yang tidak mendukung kesetaraan gender.

Selain tantangan tersebut, aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah adanya potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat implementasi kebijakan kesetaraan gender. Misalnya, terjadinya reaksi balik atau resistensi yang lebih kuat dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh perubahan tersebut. Selain itu, kebijakan yang tidak dirancang dengan baik atau tidak memperhitungkan konteks lokal dapat berisiko memperburuk kesenjangan yang ada atau menciptakan ketidakadilan baru.

Dalam menghadapi dampak dan tantangan ini, penting bagi negara-negara berkembang untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis bukti dan inklusif dalam merancang serta melaksanakan kebijakan kesetaraan gender. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi perubahan menuju kesetaraan gender yang lebih besar. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya bersama ini dapat membawa dampak yang positif dan berkelanjutan bagi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan di negara-negara berkembang.

PENUTUP

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan kesetaraan gender di negara-negara berkembang memiliki dampak dan tantangan yang kompleks. Meskipun kebijakan tersebut memiliki potensi besar untuk memajukan posisi dan peran perempuan dalam masyarakat, namun berbagai faktor seperti budaya patriarki, keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya dukungan politik dapat menjadi hambatan yang serius. Tantangan lainnya termasuk adanya potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut dan perlunya perubahan sikap dan norma masyarakat yang tidak selalu mudah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang

holistik dan berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi perubahan menuju kesetaraan gender yang lebih besar. Meskipun demikian, dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan bahwa implementasi kebijakan kesetaraan gender di negara-negara berkembang akan membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Farazila, E., Riani, N. Z., & Rahmizal, M. (2023). Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pembangunan Perekonomian Daerah Wilayah Pro Gender di Kabupaten / Kota Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(4), 57–68.
- Iskandar, D. J. (2021). ADVOKASI KEBIJAKAN PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN. *Jurnal Publik Administrasi Dan Kebijakan*, 3(1), 461–476.
- Jonathan, & Sarwono. (2018). *Meode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Karwati, L. (2020). Menolak subordinasi gender berdasarkan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan nasional menjelang bonus demografi 2035. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*, 5(2), 122–130.
- Kasus, S., Provinsi, B., & Tengah, J. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Analisis Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 93–108.
- Khaerani, S. N. (2017). KESETARAAN DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM BIDANG EKONOMI PADA MASYARAKAT TRADISIONAL SASAK DI DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA Siti Nurul Khaerani □. *Qawwām*, 11(1), 59–76.
- Larasati, A. M. (2020). THE EDUCATION FOR GENDER EQUALITY AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA: CONTEMPORARY ISSUES AND CONTROVERSIAL PROBLEMS. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 73–84. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>
- Mandasari, N. (2022). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). *EBISMA (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 50–59.
- Napitupulu, F., & Ekawaty, M. (2022). KETIMPANGAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KASUS PADA NEGARA-NEGARA ASIA TIMUR DAN PASIFIK. *JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES*, 1(1), 29–43.
- Nona, A. D. (2018). KESETARAAN GENDER MELALUI STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI P4TK TK DAN PLB BANDUNG GENDER. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 46–63.
- Nuraeni, Y., & Lilin Suryono, I. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.134>
- Rini, I., Ari, D., Waloejo, B. S., & Hariyani, S. (2022). KESETARAAN GENDER DAN KETERKAITANNYA DENGAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI INDONESIA : STUDI KASUS KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU , JAWA TIMUR. *Jurnal Pengembangan Kota*, 10(1), 23–35. <https://doi.org/10.14710/jpk.10.1.23-35>
- Soegiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Trisnawati, O., & Widiensyah, S. (2022). KESETARAAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI. *JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN HUMANIORA*, 13(2), 339–347.
- Ummah, A., Anadya, C., Putri, S., Dewi, N. J., Sarasvati, R. D., Pembangunan, U., & Veteran,

- N. (2023). Kesetaraan Gender dan Politik: Studi Kasus Terpilihnya Julia Gillard dalam Lembaga Pemerintah Australia. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 32(2), 249–268.
- Veronica, A., Ernawati, Rasdiana, Abas, M., Yusriani, Hadawiah, Hidayah, N., Sabtohad, J., Marlina, H., Mulyani, W., & Zulkarnaini. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. In *Pt. Global Eksekutif Teknologi*.